



Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Lain-Lain yang Sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Aenun Siri^{1*}, Muhammad Ridwan²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: ¹siriaenun20@email.com, ²ridwanjack19@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, lain-lain PAD yang sah terhadap pertumbuhan ekonomi studi empiris pada BPS kabupaten dan kota di Provinsi Banten tahun 2016-2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan variabel independen pada penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, lana BUMD dan lain-lain PAD yang sah. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di BPS (Badan Pusat Statistik) Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Data *cross section* pada Penelitian adalah 8 kabupaten/kota di provinsi Banten dan data *time series* pada penelitian ini adalah tahun 2016 s/d 2020 dengan menggunakan metode *sampel jenuh*. Seluruh data yang digunakan dimasukkan dalam program statistik komputer yaitu *E-Views* 9 untuk dilakukan pengujian. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Banten 2016-2020. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara signifikan pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Lain-Lain PAD Yang Sah, Pertumbuhan Ekonomi.

Abstract

This study aims to determine the effect of local taxes, regional levies, BUMD profits, other legitimate PAD on economic growth empirical studies at district and city BPS in Banten Province in 2016-2020. This type of research is quantitative research. the dependent variable used in this study is economic growth and the independent variables in this study are local taxes, regional levies, BUMD funds and other legitimate PAD. The research used in this study is the district / city in BPS (Central Bureau of Statistics). The data analysis used is panel data regression analysis. The cross section data in this study were 8 districts/cities in the province of Banten and the time series data in this study was from 2016 to 2020 using the saturated sample method. All data used were entered in a computer statistical program, namely E-Views 9 for testing. The results of the study can be concluded that local taxes, regional levies, BUMD profits and other legitimate PAD simultaneously have a significant effect on economic growth in Banten Province 2016-2020. The results of the study show that significantly local taxes, regional levies, BUMD profits and other legitimate PAD have no effect on economic growth.

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, BUMD Profits, Other Legitimate PAD, Economic Growth.

PENDAHULUAN

Memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya upaya dan strategi dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesejahteraan dalam hidup bisa terwujud jika penduduk mampu berpartisipasi dalam pembangunan secara daerah maupun nasional. Ikut serta masyarakat pembangunan dan ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut untuk memanfaatkan serta menikmati hasil pembangunan. Partisipasi ini merupakan bentuk kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang perpajakan karena pajak merupakan salah satu sektor yang potensial dari sisi sumber penerimaan dalam negeri. Karena dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan wilayah yang luas bisa untuk dijadikan peluang oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penunjang jalannya roda pemerintah dan pembiayaan pembangunan secara daerah maupun nasional.

Kesejahteraan masyarakat BPS mempunyai ketentuan delapan bidang indikator di dalamnya, yaitu mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan serta sosial lainnya yang dijadikan acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

“Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang mutlak yang dilakukan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dimana pertumbuhan ekonomi menjadi target utama dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan dalam kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan, dan hasil pertumbuhan ekonomi akan dapat pula dinikmati masyarakat sampai dilapisan paling bawah, baik sendirinya maupun dari campur tangan pemerintah. Pertumbuhan harus berjalan secara beriringan dan terencana agar hasil pembangunan dapat merata, maka daerah yang miskin, tertinggal dan tidak produktif menjadi produktif yang akhirnya mempercepat pertumbuhan itu sendiri, yang dikenal dengan strategi *Redistribution With Growth* (Sirojuzilam, 2015).

Pembangunan ekonomi tingkat daerah itu memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi tingkat nasional dan mencetus keberhasilan pembangunan di tingkat nasional, Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia mempunyai landasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pertambahan. Dengan berlandas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah berharap menciptakan efisiensi kinerja dalam perekonomian sehingga menciptakan kestabilan dan tingkat mikro ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan paling penting dalam proses penyelenggaraan otonomi daerah yang komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD dan pendapatan lainnya. Otonomi Daerah merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat (Bella Chintya Edwin, 2014).

Kabupaten Lebak, Banten, mendapatkan dana desa pada tahun 2019 ini mencapai Rp 432,9 miliar lebih. Dana sebesar itu berasal dari berbagai sumber yakni dana dari APBN sebesar Rp 286,7 miliar, alokasi dana desa APBD Kabupaten Rp 119,4 miliar dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten Rp 9,6 miliar, dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi Banten sebesar Rp 17 miliar. Dana desa sebesar itu akan dibagikan untuk 340 desa di Kabupaten Lebak dengan jumlah alokasi masing-masing desa berkisar antara Rp 1,1 miliar sampai dengan Rp 3 miliar per desa. Dana desa yang berasal dari APBN akan dibagikan ke setiap desa masing-masing Rp 700 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar yang diprioritaskan penggunaannya untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari latar belakang masalah tersebut sehingga munculnya niat serta keinginan penulis membenarkan yang telah diuraikan dengan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Lain-lain PAD yang sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten”.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan akibat dari kenaikan jumlah ekonomi produksi suatu perekonomian dan diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat. (Minaa & Ratna, 2020).

Definisi Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi. Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (Kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Definisi Retribusi Daerah

Sudarmana & Gede (2020) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian lain tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pemerintah daerah menyediakan berbagai fasilitas baik kepada kepentingan individu maupun badan.

Definisi Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sumber modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham. Penyertaan modal daerah ditetapkan dengan perda yang kemudian dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD dimana dapat berupa uang dan barang milik daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa BUMD dibagi kedalam 2 (dua) jenis, yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.

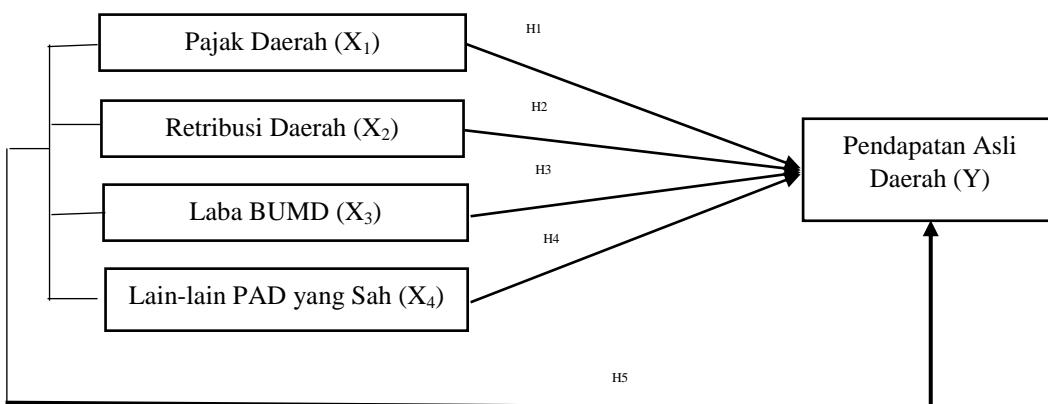
Definisi Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan pemerintah daerah diluar penerimaan dinas, pajak, retribusi dan bagian laba perusahaan daerah. Penerimaan ini antara lain berasal daeri sewa rumah dinas milik daerah, hasil penjualan barang-barang (bekas) milik daerah, penerimaan kios milik daerah dan penerimaan uang langganan majalah daerah (Hidayat & Nalle, 2017).

Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mendorong tingkat spesialis. Dengan adanya spesialis akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi atau mepercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong tingkat perkembangan teknologi. Jadi menurut teori klasik pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya perpacuan antara perkembangan penduduk dan kemajuan teknologi. Apabila pembangunan sudah terjadi maka proses tersebut akan terus menerus berlangsung secara komulatif. Asal sedikit permodalan awal dan kemungkinan-kemungkinan pasar, pembagian kerja dan spesialisasi akan terjadi, sehingga timbul kenaikan produktivitas dan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses yang mantap dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar (Faruq & Mulyanto, 2017). Pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur dari pengembangan produk domestik bruto riil yang dicapai oleh suatu negara, wilayah/daerah. *Economic Growth* ialah aktivitas dalam dunia ekonomi berefek pada barang dan jasa yang diproduksikan dimasyarakat bertambah dan kemakmuran meningkat (Minaa & Ratna, 2020).

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel independen yaitu pajak daerah (X₁), retribusi daerah (X₂), laba BUMD (X₃), dan Lain-lain PAD yang sah serta variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi (Y). Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Lain-lain PAD yang sah Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kontribusi PAD terhadap total penerimaan Daerah merupakan indikator bagi kemandirian suatu daerah. Semakin besar proporsinya, maka pertumbuhan ekonomi regional dapat dicapai secara mandiri (Hidayat & Nalle, 2017).

H_1 : Diduga Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Lain-lain PAD yang sah Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah, dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah (Selatan et al., 2017). Kontribusi PAD terhadap total penerimaan Daerah merupakan indikator bagi kemandirian suatu daerah. Semakin besar proporsinya, maka pertumbuhan ekonomi regional dapat dicapai secara mandiri (Hidayat & Nalle, 2017).

H_1 : Diduga Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten.

Pengaruh Retribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Siahaan (2013:56) Retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan. Menurut (Amad, 2016) yakni daerah provinsi, kabupaten atau kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan melalui menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan tersebut. Sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kontribusi PAD terhadap total penerimaan Daerah merupakan indikator bagi kemandirian suatu daerah. Semakin besar proporsinya, maka pertumbuhan ekonomi regional dapat dicapai secara mandiri (Hidayat & Nalle, 2017).

H_2 : Diduga Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten.

Pengaruh Laba BUMD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penerimaan PAD lainnya yang mendukung peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya adalah dalam rangka penciptaan lapangan kerja atau mendukung pembangunan ekonomi setelah itu, BUMD juga membantu dalam melayani masyarakat merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan menurut pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 33 meliputi (a) bagian laba perusahaan milik daerah (b). bagian laba lembaga keuangan bank (c). bagian laba lembaga keuangan non bank (d). bagian laba atas pernyataan modal/investasi. (Nasir, 2019). Kontribusi PAD terhadap total penerimaan Daerah merupakan indikator bagi kemandirian suatu daerah. Semakin besar proporsinya, maka pertumbuhan ekonomi regional dapat dicapai secara mandiri (Hidayat & Nalle, 2017).

H_3 : Diduga Laba BUMD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten.

Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

UU No 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil suatu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor penunjang untuk melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi memakai jasa tersebut (Nasir, 2019). Kontribusi PAD terhadap total penerimaan Daerah merupakan indikator bagi kemandirian suatu daerah. Semakin besar proporsinya, maka pertumbuhan ekonomi regional dapat dicapai secara mandiri (Hidayat & Nalle, 2017).

H₄: Diduga Lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di BPS (Badan Pusat Statistik) Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Data *cross section* pada Penelitian adalah 8 kabupaten/kota di provinsi Banten dan data *time series* pada penelitian ini adalah tahun 2016 s/d 2020 dengan menggunakan metode *sampel jenuh*. Seluruh data yang digunakan dimasukkan dalam program statistik komputer yaitu *E-Views 9* untuk dilakukan pengujian.

Pengukuran Variabel Dependen

Penelitian ini mengadopsi indikator penelitian (Edwin, 2014) dengan menggunakan nilai yang didapatkan dari pertumbuhan ekonomi, diambil dari Laju PDRB (*Produk Regional Bruto*). Laju pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan sebagai perubahan PDRB atas harga konstan kabupaten/kota Provinsi Banten pada Tahun 2016-2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

Pengukuran Variabel Independen

1. Pajak daerah (X1)

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di kabupaten/kota Provinsi Banten, dan di ukur dalam satuan miliar rupiah. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah total penerimaan pajak kabupaten/kota di Provinsi Banten 2016-2020.

2. Retribusi Daerah (X2)

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten dengan adanya fasilitas jasa yang diberikan untuk masyarakat Provinsi Banten oleh pemerintah. Indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah total penerimaan retribusi daerah kabupaten/kota Provinsi Banten 2016-2020.

3. Laba BUMD (X3)

Laba BUMD merupakan laba yang dihasilkan perusahaan BUMD di Provinsi Banten. Indikator yang digunakan pada penelitian adalah Pendapatan BUMD yang digunakan dalam penelitian ini adalah total penerimaan pendapatan BUMD kabupaten/kota Provinsi Banten 2016-2020.

4. Lain-lain PAD yang Sah (X4)

Indikator lain-lain PAD yang sah dalam penelitian ini adalah total seluruh penerimaan pendapatan yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah kabupaten/kota Di Provinsi Banten Tahun 2016-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD lain-lain PAD yang sah dan pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di provinsi Banten tahun 2016-2020. Data *cross section* pada Penelitian adalah 8 kabupaten/kota di provinsi Banten dan data *time series* pada penelitian ini adalah tahun 2016 s/d 2020 dengan menggunakan metode *sampel jenuh*.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	2.434250	7.17E+08	47480245	14920261	2.37E+08
Median	3.690000	3.87E+08	33991698	12735738	2.03E+08
Maximum	5.580000	2.15E+09	1.62E+08	57766074	7.98E+08
Minimum	-8.710000	33732242	8560073.	0.000000	25388337
Std. Dev.	3.337523	6.89E+08	39790880	17003914	1.83E+08
Skewness	-1.762030	0.597990	1.099843	1.578135	1.562182

Kurtosis	5.404123	1.768740	3.371355	4.548490	5.195212
Jarque-Bera	30.33135	4.910618	8.294199	20.59978	24.30102
Probability	0.000000	0.085837	0.015810	0.000034	0.000005

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil tabel diatas menunjukkan nilai N atau jumlah data yang akan diteliti berjumlah 8 sampel. Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai terkecil (Minimum) sebesar 8.71 yang dimiliki oleh seluruh kabupaten dan kota provinsi banten dan nilai terbesar (Maximum) sebesar 5.58 yang dimiliki oleh seluruh kabupaten dan kota provinsi banten. Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang dimiliki 30 data menunjukkan hasil yang positif sebesar 2.43 yang artinya secara umum pertumbuhan ekonomi yang diterima secara positif. Nilai standar deviasi pertumbuhan ekonomi 3.33 (diatas rata-rata), artinya pertumbuhan ekonomi memiliki tingkat variasi data yang tinggi

Pajak daerah memiliki nilai terkecil (Minimum) sebesar 337 yang dimiliki oleh seluruh kabupaten dan kota provinsi banten dan nilai terbesar (Maximum) sebesar 215 yang dimiliki oleh seluruh kabupaten dan kota provinsi banten. Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang dimiliki 30 data menunjukkan hasil yang positif sebesar 7.17 yang artinya secara umum pertumbuhan ekonomi yang diterima secara positif. Nilai standar deviasi pertumbuhan ekonomi 6.89 (diatas rata-rata), artinya pertumbuhan ekonomi memiliki tingkat variasi data yang tinggi

Retribusi daerah memiliki nilai terkecil (Minimum) sebesar 856 yang dimiliki oleh seluruh kabupaten dan kota provinsi banten dan nilai terbesar (Maximum) sebesar 1.62 yang dimiliki oleh seluruh kabupaten dan kota provinsi banten. Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang dimiliki 30 data menunjukkan hasil yang positif sebesar 474 yang artinya secara umum pertumbuhan ekonomi yang diterima secara positif. Nilai standar deviasi pertumbuhan ekonomi 397 (diatas rata-rata), artinya pertumbuhan ekonomi memiliki tingkat variasi data yang tinggi

Laba BUMD memiliki nilai terkecil (Minimum) sebesar 0.00 yang dimiliki oleh seluruh kabupaten dan kota provinsi banten dan nilai terbesar (Maximum) sebesar 577 yang dimiliki oleh seluruh kabupaten dan kota provinsi banten. Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang dimiliki 30 data menunjukkan hasil yang positif sebesar 149 yang artinya secara umum pertumbuhan ekonomi yang diterima secara positif. Nilai standar deviasi pertumbuhan ekonomi 170 (diatas rata-rata), artinya pertumbuhan ekonomi memiliki tingkat variasi data yang tinggi

Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai terkecil (Minimum) sebesar 253 yang dimiliki oleh seluruh kabupaten dan kota provinsi banten dan nilai terbesar (Maximum) sebesar 7.98 yang dimiliki oleh seluruh kabupaten dan kota provinsi banten. Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang dimiliki 30 data menunjukkan hasil yang positif sebesar 2.37 yang artinya secara umum pertumbuhan ekonomi yang diterima secara positif. Nilai standar deviasi pertumbuhan ekonomi 1.83 (diatas rata-rata), artinya pertumbuhan ekonomi memiliki tingkat variasi data yang tinggi

Analisis Data Panel

Tabel 2. Hasil Analisis Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.796485	1.057989	2.643208	0.0122
PD_X1	-8.64E-10	1.41E-09	-0.614348	0.5430
RD_X2	-5.25E-09	2.68E-08	-0.195835	0.8459
LABA_BUMD_X3	-7.05E-08	6.56E-08	-1.073770	0.2903
LAIN_LAIN_NYA_YANG_SAHL_X	6.44E-09	5.66E-09	1.136526	0.2635

Adapun persamaan regresi data panel dalam *random effect* model adalah sebagai berikut:

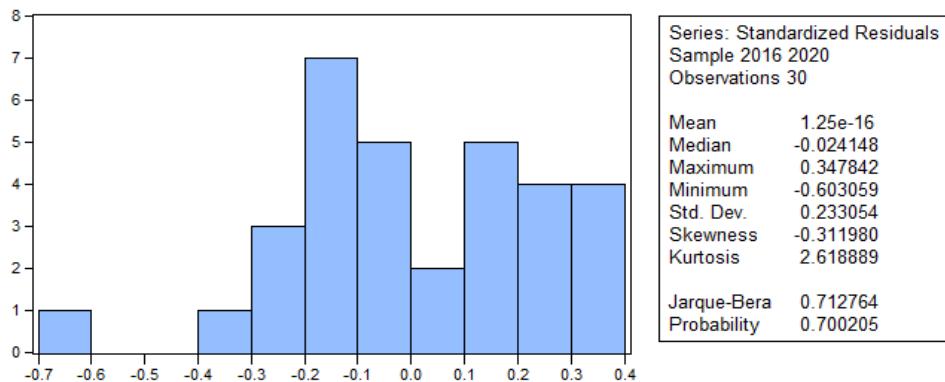
$$Y = 2.79 - 8.64 PD - 5.25 RD - 7.05 \text{Laba BUMD} + 6.44 \text{Lain-lainnya yang Sah}$$

Dimana nilai konstanta = 2.79 apabila pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah bernilai konstanta maka pertumbuhan ekonomi juga akan konstanta sebesar 2.79. Pajak daerah sebesar -8.64 apabila pajak daerah meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 8.64 %, dengan asumsi retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah konstan. Retribusi daerah sebesar -5.25 apabila pajak daerah meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 5.25 %, dengan asumsi pajak daerah, laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah konstan. Laba BUMD sebesar -7.05 apabila pajak daerah meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 7.05 %, dengan asumsi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD

yang sah konstan. Lain-lainnya yang sah sebesar 6.44 apabila pajak daerah meningkat sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 6.44 %, dengan asumsi pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas



Gambar grafik diatas setelah dilakukan outlier data menunjukan nilai probability berdistribusi normal atau prasyarat sudah terpenuhi. Berdasarkan hasil uji diatas nilai probability lebih dari taraf yang sudah ditetapkan yang menjadi acuan data tersebut berdistribusi normal ($0.700205 > 0.05$) maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

	PD_X1	RD_X2	LABA_BUMD_X3	LAIN_LAIN_NY_A_YANG_SAHA_X
PD_X1	1.000000	0.821252	0.556579	0.546440
RD_X2	0.821252	1.000000	0.684644	0.650992
LABA_BUMD_X3	0.556579	0.684644	1.000000	0.838867
LAIN_LAIN_NY_A_YANG_SAHA_X	0.546440	0.650992	0.838867	1.000000

Tabel diatas menunjukan nilai untuk setiap semua korelasi antara variabel independen tidak terdapat nilai koefisien korelasi yang lebih besar 0,90 sehingga uji ini dapat disimpulkan tidak terjadinya masalah multikolineritas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.491706	Mean dependent var	2.461333
Adjusted R-squared	0.385811	S.D. dependent var	3.486377
S.E. of regression	2.732281	Akaike info criterion	5.025007
Sum squared resid	179.1687	Schwarz criterion	5.305247
Log likelihood	-69.37511	Hannan-Quinn criter.	5.114658
F-statistic	4.643347	Durbin-Watson stat	1.916213
Prob(F-statistic)	0.004179		

Hasil uji autokorelasi tersebut, nilai Durbin-Watson (d) menunjukan nilai 1.916213 dengan jumlah sampel sebanyak 30 ($n=30$), variabel independen dan dependen sebanyak 5 ($k=5$), didapatkan DurbinLower (d_L) =0.9530 dan Durbin Upper (d_U) =1.8863 dan $4-d_L = 3.047$ $4-d_U = 2.1137$ Hasil tersebut

menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (d) terletak diantara nilai dU dan 4-dU ($1.8863 < 1.916213 < 2.1137$) yang berarti bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Koefisien Determinasi

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.491706	Mean dependent var	2.461333
Adjusted R-squared	0.385811	S.D. dependent var	3.486377
S.E. of regression	2.732281	Akaike info criterion	5.025007
Sum squared resid	179.1687	Schwarz criterion	5.305247
Log likelihood	-69.37511	Hannan-Quinn criter.	5.114658
F-statistic	4.643347	Durbin-Watson stat	1.916213
Prob(F-statistic)	0.004179		

Tabel diatas menunjukkan hasil Adjusted R-squared yaitu 0.385811 hal ini menunjukkan bahwa presentasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,38 % dan sisanya 99,62 % dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian.

Uji Simultan

Tabel 7. Hasil Simultan

R-squared	0.491706	Mean dependent var	2.461333
Adjusted R-squared	0.385811	S.D. dependent var	3.486377
S.E. of regression	2.732281	Akaike info criterion	5.025007
Sum squared resid	179.1687	Schwarz criterion	5.305247
Log likelihood	-69.37511	Hannan-Quinn criter.	5.114658
F-statistic	4.643347	Durbin-Watson stat	1.916213
Prob(F-statistic)	0.004179		

Hasil perhitungan yang didapat nilai probabilitas (F-statistic) sebesar 0.004179 yang mana lebih kecil dari 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak dapat mempengaruhi variabel dependen.

Uji Parsial

Tabel 8. Hasil Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.796485	1.057989	2.643208	0.0122
PD_X1	-8.64E-10	1.41E-09	-0.614348	0.5430
RD_X2	-5.25E-09	2.68E-08	-0.195835	0.8459
LABA_BUMD_X3	-7.05E-08	6.56E-08	-1.073770	0.2903
LAIN_LAIN_NYA_YANG_SA				
H_X	6.44E-09	5.66E-09	1.136526	0.2635

Hasil menunjukkan bahwa hasil uji t diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil perhitungan menggunakan E-views 9 menunjukkan pengujian bahwa pajak daerah t_{hitung} sebesar absolut 0,614348 jika dibandingkan t_{tabel} pada tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ dengan df $(n-k-1)$ atau $30-4-1 = 25$, (0.05) (25) yaitu sebesar 1.72472 maka t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0.614348 < 1.72472$). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.5430 menunjukkan nilai lebih besar dari nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0.05 ($0.5430 > 0.05$), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Banten 2016-2020.

Tingginya Laba BUMD yang didapat oleh kas negara, baik pusat maupun daerah tidak berpengaruh terhadap perumbuhan ekonomi pada suatu daerah, karena banyak nya pengukuran faktor dalam teori pertumbuhan klasik, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan (Syahputra, 2017). Serta faktor pengukur dalam Teori Perumbuhan Neo Klasik, dalam analisanya pertumbuhan ekonomi tergantung pertambahan dan penawaran

faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat. (Syahputra, 2017).

Meningkatnya kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pembentukan modal, mendorong kemajuan teknologi, memperkaya spesialis, dan memperluas pasar, sehingga akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi menurut teori pertumbuhan Adam Smith (Faruq & Mulyanto, 2017).

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil perhitungan menggunakan E-views 9 menunjukkan pengujian bahwa retribusi daerah t_{hitung} sebesar absolut 0,195835 jika dibandingkan t_{tabel} pada tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ dengan df $(n-k-1)$ atau $30-4-1 = 25$, (0.05) (25) yaitu sebesar 1.72472 maka t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0.195835 < 1.72472$). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.8459 menunjukkan nilai lebih besar dari nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0.05 ($0.8459 > 0.05$), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Banten 2016-2020.

Tingginya Laba BUMD yang didapat oleh kas negara, baik pusat maupun daerah tidak berpengaruh terhadap perumbuhan ekonomi pada suatu daerah, karena banyaknya pengukuran faktor dalam teori pertumbuhan klasik, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan (Syahputra, 2017). Serta faktor pengukur dalam Teori Perumbuhan Neo Klasik, dalam analisanya pertumbuhan ekonomi tergantung pertambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat. (Syahputra, 2017).

Meningkatnya kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pembentukan modal, mendorong kemajuan teknologi, memperkaya spesialis, dan memperluas pasar, sehingga akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi menurut teori pertumbuhan Adam Smith (Faruq & Mulyanto, 2017).

3. Pengaruh Laba BUMD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil perhitungan menggunakan E-views 9 menunjukkan pengujian bahwa laba BUMD t_{hitung} sebesar absolut 1,073770 jika dibandingkan t_{tabel} pada tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ dengan df $(n-k-1)$ atau $30-4-1 = 25$, (0.05) (25) yaitu sebesar 1.72472, maka t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1.073770 < 1.72472$). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.2903 menunjukkan nilai lebih besar dari nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0.05 ($0.2903 > 0.05$), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laba BUMD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Banten 2016-2020.

Tingginya Laba BUMD yang didapat oleh kas negara, baik pusat maupun daerah tidak berpengaruh terhadap perumbuhan ekonomi pada suatu daerah, karena banyaknya pengukuran faktor dalam teori pertumbuhan klasik, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan (Syahputra, 2017). Serta faktor pengukur dalam Teori Perumbuhan Neo Klasik, dalam analisanya pertumbuhan ekonomi tergantung pertambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat. (Syahputra, 2017).

Meningkatnya kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pembentukan modal, mendorong kemajuan teknologi, memperkaya spesialis, dan memperluas pasar, sehingga akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi menurut teori pertumbuhan Adam Smith (Faruq & Mulyanto, 2017).

4. Pengaruh Lain-lain PAD yang sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil perhitungan menggunakan E-views 9 menunjukkan pengujian bahwa lain-lain PAD yang sah t_{hitung} sebesar 1,136526 jika dibandingkan t_{tabel} pada tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ dengan df $(n-k-1)$ atau $30-4-1 = 35$, (0.05) (35) yaitu sebesar 1.72472, maka t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($1.136526 < 1.72472$). Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.2635 menunjukkan nilai lebih besar dari nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0.05 ($0.2635 > 0.05$), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Banten 2016-2020.

Tingginya Laba BUMD yang didapat oleh kas negara, baik pusat maupun daerah tidak berpengaruh terhadap perumbuhan ekonomi pada suatu daerah, karena banyaknya pengukuran faktor dalam teori pertumbuhan klasik, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan (Syahputra, 2017). Serta faktor pengukur dalam Teori Perumbuhan Neo Klasik, dalam analisanya pertumbuhan ekonomi tergantung pertambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi sebab perekonomian akan tetap mengalami tingkat kesempatan kerja penuh dan kapasitas alat-alat. (Syahputra, 2017).

Meningkatnya kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pembentukan modal, mendorong kemajuan teknologi, memperkaya spesialis, dan memperluas pasar, sehingga akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi menurut teori pertumbuhan Adam Smith (Faruq & Mulyanto, 2017).

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
2. Pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
3. Retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Laba BUMD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Lain-lain PAD tidak berpengaruh yang sah terhadap pertumbuhan .

Saran

Peneliti Peneliti berharap untuk peneliti selanjutnya dapat mengganti atau menambah variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini dan memiliki pengaruh terhadap pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta penelitian selanjutnya mampu menambahkan variabel moderating, variabel intervening, ataupun dengan menambahkan variabel control.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, S., & Irawan. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 177–191.
- Beritasatu.com (2019, 21 Maret) Dana Desa Untuk Kabupaten Lebak 2019. https://www.beritasatu.com/nasional/544242/dana_desa_untuk-kabupaten-lebak-2019-mencapai-rp-4329-miliar.
- BPS. (2020). Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020. Katalog, 4102004.64, 37–39.
- Dan, P., Daerah, R., & Indradi, D. (n.d.). *Pajak dan retribusi daerah* (Issue 1).
- Dewi, J. K., & Sri Budhi, M. K. (2018). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *EJurnalEkonomiDanBisnis Universitas Udayana*, 6, 1695. <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i06.p08>.
- Edwin, B. C. (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Bumd Dan Lain-Lain Pad Yang Sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Se-Kota Di Provinsi Lampung 2000-2012. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung*, 1.
- Faruq, U. Al, & Mulyanto, E. (2017). *Sejarah Teori-Teori Ekonomi* (Issue 1).
- Ghozali, I (2013). Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EVIEWS 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hakim, L., Sabil, Lestiningsih, A. S., & Pujiwidodo, D. (2017). Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan. *Sikap*, 2(1), 20–34. Sari, N., Gustian, D., & Sarwani. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Bodetabek Periode 2006 s/d 2015. *Pascasarjana Universitas Pamulang*, 491–506.
- Selatan, M., Mononimbar, R. W., Walewangko, E. N., & Sumual, J. (2017). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02), 48–59.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sihaloho, H. (2015). Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Dan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkeadilan Di Kabupaten Toba Samosir. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *ii*, 28–46. <https://doi.org/10.54367/jmb.v1i1.97>.
- Sunarto, & Sunyoto, Y. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah yang Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). *Jurnal Ekonomi*, *43*, 13–22.
- Tambayong, J. D., Mandey, S. L., Ogi, I. W. J., Pengaruh, A., Pajak, P., Dan, D., Daerah, R., Idham, N., Siwu, H. F. D., & Ratulangi, U. S. (2021). Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tidore Kepulauan dan Kota Analysis of the Effect of Local Tax Revenue and Levies On Economic Growth In Tidore Island City and Ternate City (2010-2019) Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurnal EMBA Vol. 9 No. 3 Juli 2021. Hal. 141- 150. 9(3), 141–150.